

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari jejak rekam sejarah, gerakan sosial bukanlah suatu isu baru termasuk didalamnya yakni gerakan perjuangan serikat buruh. Era keemasan gerakan serikat buruh terjadi ketika era Orde Baru masih belum berkuasa dan gerakan serikat buruh dianggap sebagai satu kekuatan yang begitu diperhitungkan keberadaannya dengan kemampuan mengkonsolidasi diri, dan mengajukan berbagai tuntutan atas kondisi kerja yang mereka hadapi saat itu. Namun hal itu berubah saat era Orde Baru mulai berkuasa, dimana kekuatan komunis telah berhasil dihancurkan, penguatan pengaruh, kontrol dan indoktrinasi yang kuat oleh kapitalis akhirnya memaksa gerakan serikat buruh mengikuti agenda kebijakan Orde Baru dan hanya berfokus pada ekonomis serta menjadi apolitis (Tedjasukmana, 2008:11).

Jika dilihat secara historis gerakan sosial merupakan sebuah fenomena yang universal. Rakyat di seluruh masyarakat tentu memiliki alasan untuk bergabung dan berjuang demi mendapatkan tujuan kolektif yang diharapkan dan akhirnya secara bersama-sama menentang orang-orang yang berani menghalangi tujuan itu (Sztompka, 2004:329). Terlepas dari adanya pertumbuhan industrialisasi yang kian pesat, kondisi buruh paska masa keemasan gerakan serikat buruh masih berada posisi yang tidak adil, meskipun kebijakan upah minimum telah diterapkan sejak awal 1970an, namun dalam prakteknya seakan hal itu hanyalah berperan sebagai alat untuk mengontrol para buruh, yang nantinya alat kontrol tersebut dapat dinaikkan maupun dipertahankan tergantung dari kebutuhan dan kebijakan kapital.

Hal itu pun yang menyebabkan terjadinya gesekan antara buruh dan perusahaan industri (kapital) yang kemudian memicu terjadinya konflik dan berakhir dengan adanya aksi mogok kerja ataupun aksi demo kepada pihak manajemen perusahaan baik yang didasari karena tuntutan kondisi atau lingkungan kerja yang kurang memadai, kebijakan mengenai cuti, lemburan,

kontrak kerja, Jamsostek, masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), maupun masalah upah yang sering menjadi topik utama dasar adanya mogok kerja maupun demo. Hal-hal seperti ini pun akhirnya terus terjadi bahkan terus berulang sampai sekarang.

Namun, melihat realita yang memungkinkan mudahnya terjadi gesekan konflik antar keduanya, masih banyak pula masyarakat yang terus menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari bekerja di suatu industri. Hal ini karena bagi negara-negara yang berkembang, seperti halnya Indonesia industrialisasi merupakan suatu keniscayaan. Bahkan, dianggap sebagai suatu pilihan yang strategis dalam model pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (Jamaluddin, 2005:215).

Begitupun yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Gresik yang memilih menggantungkan kehidupannya pada penghasilan yang mereka hasilkan dari bekerja di suatu industri atau pabrik yang diketahui memang terdapat cukup banyak pabrik yang beroperasi di Gresik. Sebutan Gresik sebagai kota industri tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain selain dari warga Gresik, baik untuk bekerja maupun mencari peruntungan di Gresik dengan tujuan untuk memperbaiki status ekonominya. Namun, banyak hal yang perlu dipertimbangkan secara matang apabila telah memutuskan untuk menjalani pekerjaan sebagai pekerja atau karyawan pabrik, yakni berbagai resiko yang harus ditanggung seperti resiko kesehatan, resiko kecelakaan kerja, resiko pemecatan, bahkan resiko PHK yang berakibat buruk pada para karyawannya.

Resiko-resiko seperti inilah yang coba diminimalisir oleh para buruh atau pekerja dengan mempertahankan hak-haknya sebagai pekerja dimana dalam kinerjanya juga mencakup dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama), hal ini didasarkan karena seringkali perusahaan tidak berpihak pada hak-hak yang harusnya diterima oleh buruh, serta ketidakadilan dalam hubungan kerja. Beberapa gerakan perlawanan sering dilakukan oleh para buruh demi mempertahankan hak-haknya, seperti halnya gerakan-gerakan buruh yang dinaungi oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia), dimana FSPMI merupakan suatu organisasi serikat pekerja yang turut memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buruh. FSPMI banyak menggawangi aksi turun ke jalan

menuntut keadilan demi mempertahankan hak-hak buruh, mengkritisi kebijakan-kebijakan berpengaruh yang ditujukan untuk eksploitasi buruh dengan mengumpulkan massa dan meleburkannya menjadi suatu tentara besar yang berjuang demi kepentingan buruh.

Melalui FSPMI inilah mulai muncul gerakan-gerakan sosial yang keberlangsungannya dianggap penting mengingat perlunya jalinan hubungan kerja yang baik dan tercapainya tujuan bersama diantara buruh dan perusahaan industri (kapital). Salah satu aksi yang sering dilakukan oleh buruh dalam naungan FSPMI Gresik yakni gerakan mengenai isu UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten), dalam hal ini yaitu tuntutan kenaikan UMK Gresik. Gerakan ini dilakukan demi tercapainya kesejahteraan buruh yang diharapkan selama ini dapat tercapai terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga selama bertahun-tahun perjuangan dalam gerakan ini tetap dilakukan walau terkadang tidak membuahkan hasil dari gerakan tersebut. Namun keinginan untuk bisa mempertahankan hak yang harusnya dimiliki oleh buruh akhirnya membentuk proses yang panjang dalam perjalanan gerakan buruh terutama buruh Gresik dalam menuntut kenaikan UMK dengan dinaungi oleh FSPMI Gresik.

Dalam gerakan yang dilakukan oleh FSPMI Gresik ini tentu tidak lepas dari suatu mobilisasi berbagai sumber daya yang ditujukan untuk membangun aksi-aksi kolektif, termasuk didalamnya mengenai berbagai modal yang menunjang gerakan dalam artian sumber daya yang dimiliki, taktik suatu gerakan sosial, dan bagaimana gerakan sosial dapat memobilisasi itu semua menjadi suatu gerakan sosial buruh yang berpengaruh yang nantinya akan menghidupkan kembali keadilan akan hubungan buruh dengan perusahaan industri, maupun hubungan buruh dengan pemerintah terutama dalam permasalahan UMK Gresik, karena pada dasarnya suatu keberhasilan maupun kegagalan dari gerakan yang dilakukan juga dipengaruhi dengan kemampuan mobilisasi pergerakan sosial.

Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana strategi mobilisasi sumber daya dalam suatu gerakan sosial yang dilakukan oleh buruh untuk menuntut kenaikan UMK yang dilakukan melalui Serikat FSPMI Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi mobilisasi sumber daya FSPMI Gresik dalam menuntut upah minimum kota/kabupaten?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi mobilisasi sumber daya FSPMI Gresik dalam menuntut upah minimum kota/kabupaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Peneliti

1. Memperkaya khazanah keilmuan memperbanyak khazanah bacaan dan keilmuan serta mampu memberikan sumbangan bagi ilmu sosiologi khususnya di bidang gerakan sosial

1.4.2 Bidang Keilmuan

1. Menjadi referensi dalam keilmuan sosiologi dalam penelitian berikutnya.
2. Memberikan kontribusi untuk cabang keilmuan yang kini ditekuni oleh peneliti.